

INSPIRAT

Inspirasi & Strategi

Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis

- ✓ Persepsi Petani terhadap Intervensi Kemitraan Agribisnis Sayuran
Ninuk Purnaningsih
- ✓ Pengaruh Makro Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Ika Sisbintari
- ✓ Dampak Globalisasi pada Alokasi Belanja Sektor Pendidikan pada Era Desentralisasi
Rachmat Hidayat
- ✓ Strategi Keuangan *Corporate* Melalui *Economic Value Added*
Suripto
- ✓ Strategi Pemasaran Bersaing dengan Pendekatan *Service Quality*
Sri Wahyuni
- ✓ Strategi Bersaing Bisnis *Franchise* dengan Pendekatan Strategi Pemasaran
Edy Wahyudi
- ✓ Pengaruh Karakteristik Sistem Anggaran terhadap Prestasi Kerja Karyawan:
Studi pada PT. PLN Ex- Karisidenan Besuki
Taufik Kurrohman
- ✓ Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Melalui Kebutuhan Strategis dan Praktis Gender
Joko Mulyono
- ✓ *Training Need Assesment* untuk Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Kabupaten Sampang
Anwar
- ✓ Netralitas Birokrasi Pemerintah dalam Politik Kontemporer Indonesia
Sutomo

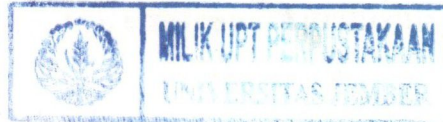
3ER

658.05

175

2

Daftar Isi



Persepsi Petani terhadap Intervensi Kemitraan Agribisnis Sayuran
Ninuk Purnaningsih..... 1-10 ✓

Pengaruh Makro Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Ika Sisbintari..... 11-23 ✓

Dampak Globalisasi pada Alokasi Belanja Sektor Pendidikan pada Era Desentralisasi
Rachmat Hidayat..... 24-34 ✓

Strategi Keuangan *Corporate* Melalui Economic Value Added
Suripto..... 35-45 ✓

Strategi Pemasaran Bersaing dengan Pendekatan *Service Quality*
Sri Wahyuni..... 46-56 ✓

Strategi Bersaing Bisnis *Franchise* dengan Pendekatan Strategi Pemasaran
Edy Wahyudi..... 57-69 ✓

Pengaruh Karakteristik Sistem Anggaran terhadap Prestasi Kerja Karyawan: Studi pada PT. PLN Ex- Karisidenan Besuki
Taufik Kurrohman..... 70-83 ✓

Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Melalui Kebutuhan Strategis dan Praktis Gender
Joko Mulyono..... 84-93 ✓

Training Need Assesment untuk Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Kabupaten Sampang
Anwar..... 94-103 ✓

Netralitas Birokrasi Pemerintah dalam Politik Kontemporer Indonesia
Sutomo..... 104-110 ✓

SER

Penyaji:	HADIRY	Klass	658.05
Tanggal:	11 NOV 2010		145
Unit/Divisi:	2 lly.		i
Pengantar:	H		

Dampak Globalisasi pada Alokasi Belanja Sektor Pendidikan pada Era Desentralisasi

The Impact of Globalization to the Education Budget Allocation on Decentralization Era

Rachmat Hidayat¹

Peneliti Lembaga Riset Ilmiah Strategis (L-RIS) dan Staff Pengajar Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

ABSTRACT

Decentralization requires the delegation of Political and Administrative authority from the central government to the local government. Due to this process, the process of public management had also received tremendous shifting. The era of decentralization necessitate local government to be aware on the interest of its people, as well as conquering the challenge of globalization. This paper aim to portray the impact of globalization to the education budget sector allocation on decentralization era. The findings suggest that globalization in the forms of political and administration delegation brings significant effects to the pattern of allocation of government spending on education sector

Keywords: *globalization, decentralization, budget allocation*

ABSTRAK

Desentralisasi melibatkan penyerahan wewenang administratif dan politis Pemerintah pusat pada level Pemerintah dibawahnya. Proses Manajemen Publik pada Era Desentralisasi juga telah mengalami pergeseran peran yang signifikan. Dalam era ini, Pemerintah daerah diharapkan melaksanakan tugas belanja anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, walau pada saat yang sama Desentralisasi juga menghadapkan Pemerintahan daerah untuk berhadapan dengan globalisasi. Artikel ini akan berusaha untuk menggambarkan apa saja dampak globalisasi pada alokasi belanja sektor pendidikan pada skala makro. Globalisasi dalam format pelimpahan kewenangan pusat pada daerah (desentralisasi) membawa dampak yang signifikan pada perubahan pola alokasi belanja Pemerintah pada sektor pendidikan.

Kata kunci: globalisasi, desentralisasi, alokasi belanja

Semenjak tahun 1980an peran pemerintah dalam manajemen sektor pendidikan nampaknya mengalami perubahan secara bertahap, baik dalam hal; Kebijakan, Infrastruktur maupun pilihan terhadap ideologi ekonomi yang dianut dalam kaitan dukungannya terhadap sentralisasi pendidikan, universalisme, model *top-down* dalam proses pembuatan kebijakan.

¹Korespondensi: LRIS (Lembaga Riset Ilmiah Strategis) Griya Permata Kampus Blok E No 17 Jember, Mobile:08155935285, Email kognisi_otak@yahoo.co.uk

Kesemua hal tersebut lantas digantikan oleh semangat lokalisme, desentralisasi dan pendekatan *bottom-up*.

Perubahan radikal dalam manajemen publik tersebut tumbuh secara masif di Eropa dan sebagian besar Amerika utara, lantas perkembangannya menjadi masif di kala konsep pengelolaan pendidikan berbasis desentralisasi ini diadopsi oleh negara-negara di Afrika, Asia dan Eropa Timur, yang sebagian besar didominasi oleh negara-negara berkembang (*underdeveloped countries*). Konteks desentralisasi pendidikan sendiri lebih ditekankan pada penyerahan kewenangan pengelolaan pendidikan pada daerah ataupun langsung pada institusi pendidikan.

Tujuan dari tulisan ini adalah mencari pertautan antara desentralisasi pendidikan dalam titik pandang globalisasi, namun sebelum mengkaji lebih jauh mengenai hal tersebut marilah kita mengupas dua item bahasan utama dari tulisan ini, yaitu ; 1. Globalisasi, 2. Desentralisasi.

Memahami Globalisasi

Pemikiran mengenai Globalisasi dimotori oleh Reagan dan Margaret Thatcher (Darsono, 2006;76), pemikiran ke dua tokoh tersebut berdasar kondisi sosial negara-negara kapitalis yang tergabung dalam kelompok G-7 yang mulai rentan dengan adanya berbagai macam krisis; krisis minyak, pengangguran yang makin tinggi dan semakin sempitnya pasar, sulitnya tenaga buruh murah, krisis perdagangan, krisis keuangan, dan langkanya bahan mentah.

Berbagai krisis di negara kapitalis (G-7) diakibatkan bahwa sebagian besar negara di dunia telah mulai bisa menata diri, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada negara-negara G-7. kondisi seperti inilah merupakan ancaman bagi kapitalis global. Mereka mencari cara untuk menyelamatkan diri melalui liberalisasi perdagangan, privatisasi BUMN dan deregulasi yang dikemas dalam format Globalisasi.

Friedman (dalam Darsono 2006) menjelaskan jika suatu negara menginginkan rakyatnya makmur, maka ia harus mengintegrasikan dirinya dengan kekuatan ekonomi dunia yang dipimpin oleh negara-negara maju (baca:US dan UK), dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh negara-negara maju, negara berkembang akan memperoleh bantuan modal, ilmu, teknologi dan tenaga ahli.

Para advokator dari globalisasi mempromosikan keunggulan dari globalisasi yang antara lain; efektifitas, efisien, cepat mengadakan evaluasi, inovatif, mengadakan deregulasi, cepat mengambil keputusan, dan adaptasi (Friedman, 2000; 218).

Awal mula perkembangan globalisasi sendiri dapat dijelaskan dengan membagi perjalanan kelahiran globalisasi dalam 2 periode (Darsono, 2006 : 72):

1. Globalisasi pertama: 1600-1945

Globalisasi pertama bisa disebut sebagai zaman kolonialisme primitif dimana bangsa barat (Eropa) dengan kekuatan militernya menjajah bangsa-bangsa Afrika, Asia dan Amerika Latin. Kaum kolonial merampok kekayaan alam bangsa-bangsa terjajah, bangsa terjajah diperlakukan sebagai budak, Kolonialisme berikutnya melahirkan;

- Perang Dunia pertama, antara negara-negara Kapitalis yang berebut daerah jajahan.
- Revolusi Sosialis di Rusia 1917, Melahirkan USSR sebagai negara sosialis pertama di dunia.
- Krisis ekonomi Amerika dan Negara-negara kapitalis lainnya pada periode 1930an

Perang Dunia kedua, perang antara negara kapitalis dalam berebut daerah jajahan, yang kemudian melahirkan -Revolusi kemerdekaan pada tanah jajahan-Perang dingin.

2. Globalisasi Kedua: 1989–sekarang.

Dalam perang dingin, USA dan sekutunya keluar sebagai pemenang pada 1989, kemenangan itu ditandai dengan bubarnya Uni Soviet, runtuhnya tembok Berlin dan tumbangnya Negara-negara sosialis di Eropa timur. Kondisi obyektif inilah yang melahirkan globalisasi kedua yang juga dapat disebut sebagai kolonialisme modern atau neo-liberalisme, artinya wajah baru globalisasi ini disamakan dalam bentuk modal, ilmu, teknologi, dan tenaga ahli untuk menguasai dunia, globalisasi pada fase ini melahirkan:

- Kedaulatan pasar bebas, yaitu kegiatan ekonomi harus didasarkan pada liberalisme dibawah hegemoni dan dominasi negara-negara maju
- Perubahan tatanan politik dunia, seiring runtuhnya Soviet, Russia masuk kedalam kelompok negara kapitalis yang terwadahi dalam kelompok G-8.
- Perubahan Tehnologi, lahirnya teknologi canggih di bidang Information Technology (IT) yang memicu derasnya iklim perdagangan bebas.
- Benturan peradaban barat dan timur yang diakibatkan kesenjangan kesejahteraan, Serangan Teroris pada Gedung WTC di Amerika dan Invasi Amerika ke Afganistan dan Iraq.

Setelah mengkaji fase-fase kelahiran dan periode waktu globalisasi hal yang penting selanjutnya untuk dilakukan adalah membedah globalisasi sendiri menjadi beberapa aspek.

Tujuan utama dari tulisan ini adalah menguraikan pertautan antara desentralisasi pendidikan pada negara berkembang dengan globalisasi, karena itu, membedah globalisasi dari aspek ekonomi dan hukum menjadi suatu yang dibutuhkan untuk menjembatani pandangan globalisasi dalam desentralisasi pendidikan.

Globalisasi Ditinjau dari Aspek Ekonomi.

Akademisi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta Revrisond Bawsir memberikan perspektif menarik ketika membicarakan globalisasi ditinjau dari aspek ekonomi Indonesia (Kompas 5 Juni 2003), menurut Bawsir, Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) merupakan fakta bahwa sistem ekonomi Indonesia bergeser dari ekonomi kerakyatan ke ekonomi neo-liberal kapitalisme yang dikuasai "Mafia Berkeley" (Arsitek utama ekonomi Indonesia pada Rezim Soeharto), Konsep utama yang digunakan oleh mafia berkeley adalah pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh hutang luar negeri baik pemerintah ataupun Swasta, hutang luar negeri sebagai modal utama pembangunan.

Mekanisme sistem ekonomi neo liberal adalah menghasilkan kondisi sosial yang penuh dengan kolusi dan korupsi, kaum birokrat menjadi pelayan modal asing, mereka mendapatkan uang jasa atas pelayanannya itu, uang jasa tersebut dikumpulkan dan kemudian menjadi kapital yang setahap demi setahap merubah mereka menjadi kapitalis, atau lebih dikenal dengan kapitalis birokrat. Di sisi lain, kegiatan modal asing juga membutuhkan bantuan dari kaum ilmuwan, pengusaha, politikus, dan militer. Mereka bertidak sebagai perwakilan (representative) modal asing.

Sistem ekonomi neo liberal yang digerakan oleh modal asing, merupakan suatu proses bergesernya kekuasaan politik dari suatu negara tertentu pada negara-negara kapitalis.

Globalisasi Ditinjau dari Aspek Hukum

Tambahan dalam Darsono (2006) memaparkan bahwa dalam aspek hukum ternyata globalisasi telah menancapkan cengkeramannya dalam konstitusi Indonesia, Amandemen UUD 1945 merupakan suatu fakta bahwa kekuatan asing berperan serta aktif. National Democratic Institute (NDI) secara tidak langsung terlibat dalam amandemen UUD 1945, Pada tanggal 9 september 1999 NDI membantu CETRO (Center for Electoral Reform) diamana programnya adalah; 1) Pilihan Presiden Secara Langsung, 2) Mengamandemen konstitusi, 3) Jejak pendapat mengenai keberadaan Mahkamah Agung, 4) Mereformasi Komisi Pemilihan Umum, 5) Amamdemen UU Pemilu, 6) Dukungan Institusional.

Program CETRO tersebut adalah mempengaruhi para birokrat dan politisi khususnya yang duduk di legislatif untuk menyesuaikan Undang-Undang Dasar beserta perangkat dibawahnya berpihak pada negara kapitalis, hal tersebut berarti bahwa CETRO mempengaruhi dan menentukan sistem Undang-Undang dan hukum di Indonesia yang harus mengabdikan pada kepentingan kapitalis global.

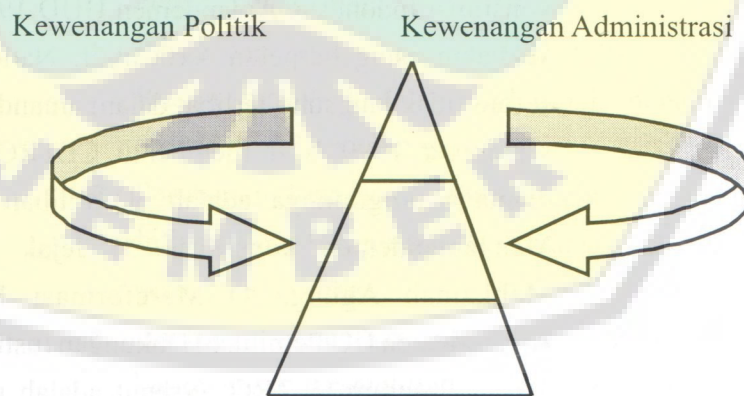
Tindakan negara-negara kapitalis untuk menyebarluaskan globalisasi melalui agen-agensya dilakukan tidak hanya di Indonesia, tapi juga dilakukan di negara-negara berkembang lain, hal ini kemudian membuktikan bahwa globalisasi di bidang ekonomi juga harus diikuti oleh globalisasi di bidang hukum.

Desentralisasi; Sebuah Deskripsi dan Tinjauan Singkat

Desentralisasi telah dipahami dan dimaknai beragam, bergantung pada *interest* dan cara pandang (*Perspective*), banyak para ahli memahami Desentralisasi dari perspektif ekonomi ataupun juga meng-intepretasikannya dari perspektif politik (Cohen dan Paterson, 1999:20-23).

Rondinelli dan Cheema (1983) mendefinisikan desentralisasi adalah merupakan transfer dari perencanaan, pembuatan keputusan, ataupun kebijakan administratif dari pemerintah pusat pada unit organisasinya, Unit administrasi lokal ataupun pemerintahan daerah. Laporan tahunan World Bank tahun 1999 (hal 107-124) mendefinisikan desentralisasi sebagai "Penyerahan kewenangan dan tanggung jawab untuk kepentingan publik pada pemerintah pusat pada level pemerintahan yang rendah ataupun badan independen milik pemerintah ataupun juga pada sektor *privat*. Definisi yang dikemukakan oleh World Bank merupakan definisi yang sangat luas dengan cakupan penyerahan wewenang pemerintah pusat pada pemerintah daerah ataupun juga pada swasta. Secara sederhana penyerahan kewenangan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1. Desentralisasi/ Devolusi



Sumber: Nurcholis (2005)

Aspirasi dari desentralisasi sendiri adalah semangat akan adanya otonomi daerah yang diharapkan dapat membentuk ulang pola hubungan antara pusat-daerah yang cenderung berkecenderungan ke pusat. Desentralisasi juga akan berarti memberikan kewenangan pusat pada intitusi lokal dan regional, hal ini akan mempertegas dan membentuk ulang paradigma dalam pengelolaan masyarakat yang selama ini terkesan 'Centralized Bias' dan meminggirkan kebutuhan masyarakat daerah (Pierre and Peters, 2000)

Desentralisasi tanpa penyerahan (devolusi) wewenang adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditawar. Devolusi berbanding lurus dengan dengan pola hubungan yang sehat antara pusat dan daerah. Seidentopft (1987) secara akurat memberikan beberapa prinsip kunci dari devolusi sebagai berikut:

1. Pemerintahan lokal bersifat otonom dengan pengurangan kontrol dari pemerintah pusat.
2. Adanya batas tegas antar wilayah geografis daerah
3. Pemerintahan daerah mempunyai kekuatan untuk mengamankan dan mengolah sumber dayanya.
4. Hubungan yang bersifat *reciprocal* antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Apa yang dijelaskan Seideptopft diatas jelas- jelas merupakan gambaran bahwa pemerintah daerah akan menjadi tonggak terdepan dalam pengelolaan manajemen daerah, hal tersebut dapat dipahami bahwa terminologi *good governance* yang dibawa oleh globalisasi tentunya membawa pelbagai macam implikasi pada sektor publik. Sebagaimana yang dinyatakan Porter (dalam Hughes, 1998:16): "Beberapa pandangan menyatakan bahwa negara akan menjadi berguna bila ia diletakkan sebagai partisipan yang pasif dalam proses persaingan internasional dimana keunggulan suatu negara ditentukan oleh absennya negara tersebut dalam pasar dan menyerahkan segala sesuatunya dalam mekanisme pasar, namun apa yang menjadi keberatan saya adalah bahwa riset saya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan suatu negara tetap mempunyai pengaruh pada daya saing suatu negara baik secara positif ataupun negatif".

Porter juga memberikan gambaran tentang beberapa sektor publik yang tetap perlu dalam lingkupan kebijakan publik/negara untuk menjaga daya saing suatu bangsa tersebut (Porter dalam Hughes, 1998:16) hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendidikan
2. Kebijakan Pajak
3. Kebijakan Kesehatan
4. Kebijakan Lingkungan
5. Kebijakan Moneter dan Fiskal, dsb

Beberapa hal yang dikemukakan Porter diatas mencoba menekankan betapa pentingnya daya saing sebuah negara dalam kaitan tantangan akan globalisasi ke depan.

Peran Undang-Undang dalam Globalisasi

UU No 32 Tahun 2004 merupakan jawaban atas perbaikan dari UU No 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah, namun ternyata apa yang ditampilkan oleh UU No 32 tahun 2004 sendiri juga masih menyimpan segenap kelemahan bila ia disandingkan dengan globalisasi,

dalam hal ini UU No 32 tersebut menyimpan potensi kegagalan untuk mengamankan daya saing Indonesia melalui sektor pendidikannya. Dalam UU No 32 tersebut diatur beberapa kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat yang antara lain:

1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan Fiskal Nasional
6. Agama

Letak kegagalan UU No 32 tahun 2004 tersebut adalah pada tiadanya kewenangan untuk mengatur sektor pendidikan pada skala pemerintahan pusat, Sebagaimana yang disampaikan Porter diatas bahwa sektor pendidikan adalah sebagai sesuatu yang penting untuk dikelola secara terpusat guna menjaga daya saing suatu negara dalam kerangka globalisasi.

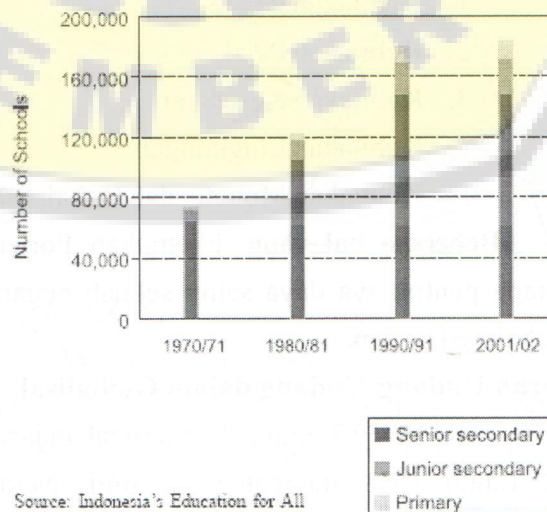
Nampaklah kemudian bahwa semangat desentralisasi yang berlangsung di Indonesia diliputi dengan semangat keblablasan dengan menafikan beberapa hal penting.

Pengaruh Globalisasi pada Pola Alokasi Belanja Pemerintah pada Sektor

Pendidikan di Era Desentralisasi.

Pendidikan merupakan faktor yang sangat vital untuk pembangunan masyarakat dalam suatu negara, perhatian serius pemerintah Indonesia pada sektor pendidikan ditandai dengan meningkatnya jumlah sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dekade 1970an dan 1980an sebagaimana yang dilukiskan dibawah ini:

Gambar 2. Jumlah Sekolah pada tahun 1970 -2000



Source: Indonesia's Education for All

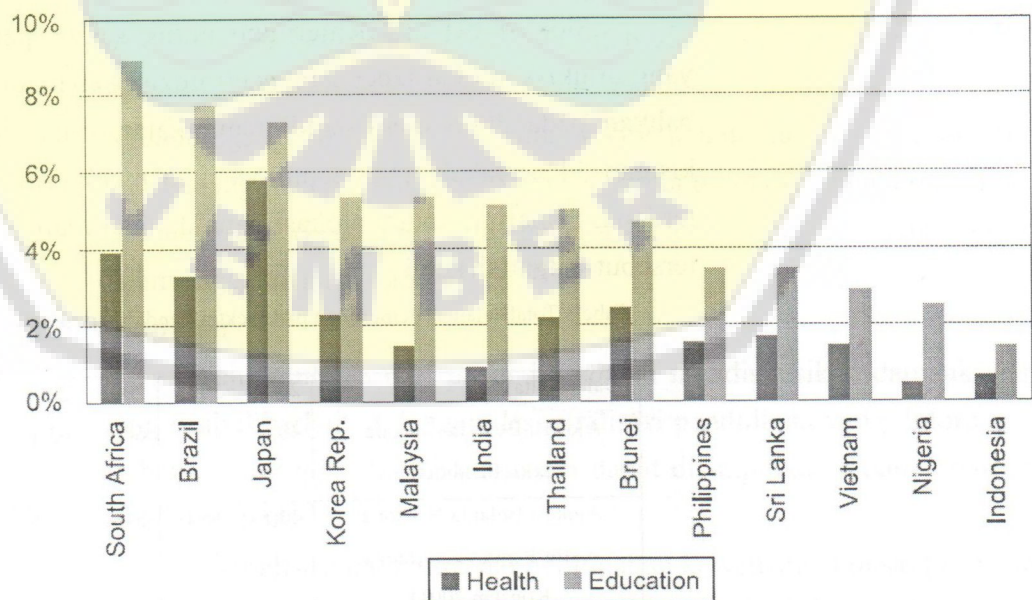
Sumber: *Indonesia's Education for all dalam Indonesia HDI Report of UNDP (2004:35)*

Pada perkembangan selanjutnya Pemerintah mulai mengenalkan program wajib belajar sembilan tahun pada pertengahan 1990an, yang terdiri atas sekolah dasar selama enam tahun dan sekolah menengah pertama selama 3 tahun..

Stabilnya kondisi perekonomian dengan capaian tingkat ekonomi yang cukup baik dengan diiringi stabilitas politik nampaknya berandil besar dalam membuat sektor pendidikan tampak menampilkan kinerja yang bagus saat itu. Hal tersebut dengan ditandai dengan kenaikan jumlah sekolah dasar dan menengah pertama pada dekade 1970an sampai akhir milenium sebagaimana yang di tampilkan oleh gambar diatas.

Fenomena tersebut dapat dipahami karena pada dekade tersebut gejala globalisasi belumlah mengedepan dan dapat ditutupi oleh akselerasi pertumbuhan ekonomi, sehingga capaian keberhasilan tersebut dapat dikatakan lebih bersifat semu daripada secara konkrit mengingat capaian negara lain dalam membelanjakan pengeluarannya untuk sektor pendidikan. Hasilnya adalah alokasi anggaran pemerintah untuk belanja pendidikan yang sangat rendah, pada dekade tersebut angka alokasi untuk belanja pendidikan sangatlah rendah dan hanya pada kisaran rerata 1,5% dari total *Gross Domestic Bruto*, coba bandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal tersebut tercermin pada tabel berikut:

Gambar 3. Perbandingan Alokasi Belanja Pemerintah untuk Sektor Pendidikan dan Kesehatan di beberapa Negara 1996 -2000.



Source: World Development Indicators

Sumber: World Development Indicators dalam Indonesia HDI Report of UNDP (2004:24)

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998 membawa dampak yang besar terhadap pelbagai macam deregulasi yang ada di Indonesia, IMF sebagai lembaga donor Indonesia kala itu memberikan berbagai resep yang berujung pada dibukanya keran globalisasi di Indonesia; pencabutan subsidi, privatisasi BUMN, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan pelaksanaan desentralisasi yang ditandai dengan otonomi daerah menjadi sekian jurus masuknya globalisasi ke sistem pengelolaan pemerintahan di Indonesia.

Dampaknya kemudian adalah pemerintah pusat harus menyerahkan sebagian kewenangannya pada pemerintah daerah termasuk pendidikan, hal ini berakibat pada pelimpahan status kepegawaian staf pendidik dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah beserta ikutan kenaikan belanja rutin untuk pegawai pada APBD.

Dampak yang paling nyata dari globalisasi pada sektor pendidikan adalah hadirnya *trend* peningkatan alokasi belanja pada sektor pendidikan semenjak pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan. Angka alokasi ini sempat mengalami penurunan sejenak pada 2004 karena kombinasi kenaikan BBM dan rendahnya pelaksanaan untuk pengeluaran pendidikan, namun hal yang menggembirakan adalah pada 2003 alokasi belanja pemerintah untuk sektor pendidikan mengalami puncaknya dengan pencapaian 16% dari seluruh total belanja pemerintah, walau pada 2004 pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sampai 4%, namun belanja pemerintah untuk pendidikan kenyataannya mengalami penurunan sampai 14% dari seluruh total belanja pemerintah.

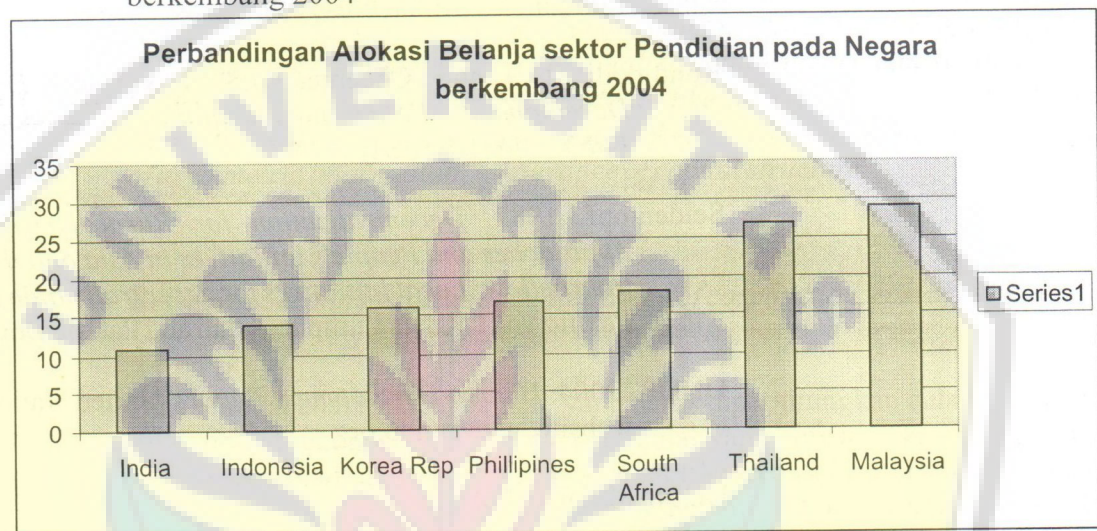
Alokasi belanja pemerintah untuk sektor pendidikan sebagaimana yang dilukiskan oleh tabel 1 mencerminkan kenaikan 14,4% pada 2005 dan bahkan pada 2006 mengalami peningkatan yang signifikan sampai pada kisaran 34%. Tabel diatas tentunya juga memberikan gambaran walaupun terdapat disparitas antara alokasi dana dengan realisasinya namun disparitas tersebut sangatlah kecil

Tabel 1. Total Belanja Pemerintah pada sektor pendidikan (Pusat+Provinsi+Kabupaten)

(Dalam Juta)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Alokasi Belanja Nasional sektor Pendidikan	40,5	48,2	64,8	63,1	79,7	120,2	137,8
Alokasi Belanja Nasional sektor Pendidikan (harga Konstan 2001)	40,5	43,1	54,3	49,8	56,9	76,2	82,2
Belanja Pendidikan (%pengeluaran total nasional)	11,4	14,3	16,0	14,2	14,9	17,2	17,5
Belanja Pendidikan (%GDP)	2,4	2,6	3,2	2,8	2,9	3,6	8,9
Total Pengeluaran Pemerintah	353,6	337,6	405,4	445,3	535,8	698,2	785,4
Belanja riil Pemerintah	353,6	301,8	339,9	351,6	382,9	442,4	468,3

Kesimpulan sementara yang dapat diambil adalah dengan datangnya globalisasi yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah maka mempunyai pengaruh yang signifikan jika dibandingkan dengan sebelum adanya era desentralisasi. Namun untuk lebih meyakinkan kita bahwa globalisasi telah memberikan pengaruh signifikannya pada alokasi belanja pendidikan marilah kita bandingkan alokasi belanja pendidikan Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya, seperti yang dilukiskan oleh gambar berikut:

Gambar 4. Perbandingan Alokasi belanja sektor pendidikan pada negara berkembang 2004



Sumber : *Indonesian Public Expenditure Review. World Bank (2007:31)*

Gambar tersebut mengukuhkan pendapat bahwa desentralisasi pendidikan di Indonesia yang dipicu oleh globalisasi membawa perubahan pada pola alokasi belanja Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Perbandingan alokasi belanja untuk sektor pendidikan pada negara-negara berkembang juga menunjukkan bahwa ternyata Indonesia juga termasuk salah satu negara berkembang yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam anggaran nasionalnya.

Simpulan

Tujuan utama dari paper ini adalah mendiskusikan dampak apakah yang timbul berkaitan dengan desentralisasi pendidikan yang didorong oleh globalisasi sebagai faktor utamanya dapat disimpulkan dalam kesimpulan sebagai berikut:

1. Globalisasi dalam format pelimpahan kewenangan pusat pada daerah (desentralisasi) membawa dampak yang signifikan pada perubahan pola alokasi belanja pemerintah pada sektor pendidikan.
2. Pengaruh yang besar dari desentralisasi pendidikan adalah meningkatnya jumlah alokasi belanja pemerintah pada sektor pendidikan secara drastis pada kisaran 30% jika dibandingkan sebelum era otonomi daerah.

Daftar Pustaka

- Cohen, J. and S. Peterson, 1999, *Administrative Decentralization, Strategies for developing Countries*, CT., Kumarian Press, West Hartford
- Darsono, P. 2006, *Ekonomi Politik Globalisasi*, Diadit Media, Jakarta
- Hughes, Owen. 1998. *Public Management and Administration*, Palgrave, New York
- Kompas 5 Juni 2003
- Nurcholis, Hanief, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta . Rajawali Pers
- Pierre, Jon and B. Guy Peters, 2000, *Governance, Politics and the State*. London: McMillan Press Ltd.
- Rondinelli, D.A., and Cheema, G.S, Eds., 1983, *Decentralization and Development : Policy Implementation in developing countries*, Sage Publications, Beverly Hills
- Seidentopf, J. 1987. *Decentralization for Rural Development: Government Approaches and People's initiatives in Asia and the Pasific in building from bellow: Local Initiatives for decentralization Development in Asia Pasific Vol. 1*. Kuala Lumpur. Asian and Pasific Development Center.
- UNDP., 2004. *Human Development Report*, United Nations for Development website; www.undp.org
- UUNo 32 tahun 2004
- World Bank, 1999, *Entering the 21st Century, Decentralizations: rethinking Government, The World Development Report 1999/2000*, Oxford University Press, New York
- World Bank , 2007, *Indonesia Public Expenditure Review 2007: Spending For Development*, World Bank and Royal Netherlands Embassy.

